

RESOLUSI KONFLIK DI ASIA TENGGARA: PENGALAMAN MUSLIM INDONESIA

Badrus Sholeh

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

badrus.sholeh@gmail.com

Abstrak

Artikel ini akan mengkaji peran kepemimpinan Muslim Indonesia dalam mewakili pemerintah dan masyarakat sipil pada upaya perdamaian di Asia Tenggara. Ini dilakukan sejak masa Menlu Ali Alatas dalam memediasi konflik di Kamboja dan Filipina Selatan, hingga periode Menteri dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Professor M. Din Syamsuddin yang memediasi Filipina Selatan dan Aceh. Muslim Indonesia juga turut memainkan peran aktif dalam memediasi konflik di Thailand Selatan dan Timur Tengah. Sebagai negara demokratis ketiga di dunia dan negara Muslim terbesar, Indonesia telah berubah menjadi negara dengan kekuatan menengah (Middle Power) dan melakukan peran utama dalam menciptakan wilayah Asia Tenggara yang stabil dan sejahtera. Artikel ini berargumen bahwa pengalaman ini bisa membawa Indonesia pada peran lebih besar di Timur Tengah dan Afrika. Tetapi peran ini terhambat akibat masih kurangnya kepercayaan negara-negara Arab yang masih memandang Indonesia sebagai negara pinggir.

[This article examines the role of Indonesian Muslim leaders representing state and civil society on conflict resolution in Southeast Asia from the period of Foreign Minister Ali Alatas on mediating conflict in Cambodia and Southern Philippines to the period of Minister and Vice President Jusuf Kalla, President Susilo Bambang Yudhoyono and Professor M. Din Syamsuddin who mediating conflict of Aceh and Southern Philippines. Indonesian Muslims also took

active participation in mediating conflicts in Southern Thailand and conflicts in the Middle East. As the third largest democratic country and the largest Muslim country, Indonesia have transformed as middle power country and confidently taken a leading role in managing stable, peacefu and prosperous region of Southeast Asia. It argues the experience of Indonesia in regional mediation will lead Indonesia towards international conflict resolution in the Middle East and Africa. However, Arab countries still consider Indonesia as periphery of Islam and cultural gap which influence the trust from Arab countries.]

Kata Kunci: *Indonesia, Muslim, Resolusi Konflik, Asia Tenggara*

Pendahuluan

Negosiasi dan resolusi konflik tidak hanya menjadi perhatian studi Hubungan Internasional tetapi juga sosiologi, psikologi, ilmu politik, ilmu hukum dan cabang ilmu lainnya. Ditingkat *postgraduate*, kajian perdamaian dan resolusi konflik menjadi pilihan lintas disiplin keilmuan. Teori konflik dan perdamaian pada mulanya digagas oleh sarjana Sosiologi. Lewis Coser adalah di antara sarjana Sosiologi awal yang menulis buku resolusi konflik secara sistematis, sebelum beberapa sosiolog lainnya mengembangkan dengan fenomena konflik yang lebih kompleks. Meskipun pembahasan perdamaian, mediasi dan resolusi konflik telah dilakukan bersamaan dengan diskusi tentang kekerasan (*violence*), konflik (*conflict*) dan perang (*war*). Martin Shaw, *reader* Sosiologi Politik dan Internasional Universitas Hull Inggris, secara menarik membahas kritik Sosiologi atas Hubungan Internasional. Shaw menganalisis pandangan Barry Buzan, salah satu tokoh realis yang sangat berpengaruh dalam studi Hubungan Internasional. Menurut Shaw bahwa Buzan dalam bukunya *People, States and Fear* menempatkan obyek keamanan kepada kebendaan (*things*) seperti negara atau senjata. Sebaliknya, Shaw menyatakan bahwa kebendaan akan kembali kepada manusia. Karena itu manusia harus menjadi pusat dan subjek keamanan. Konsepsi keamanan yang dilakukan oleh Buzan

dianggap Shaw sebagai definisi yang statis.¹

Demokrasi pascaperjanjian damai dan resolusi konflik juga menjadi perdebatan menarik dalam kajian hubungan internasional dan ilmu sosial. Banyak kritik demokrasi pascakonflik yang gagal melaksanakan misi diplomasinya akibat prinsip-prinsip yang dipaksakan. Institusionalisme liberal, salah satu bagian penting dari konsep *democratic peace*, memberi persyaratan dasar diadakannya dulu institusi-institusi demokrasi dan perdamaian sebelum diwujudkannya pelaksanaan perjanjian damai yang lebih permanen dan jangka panjang. Mark Duffield kritis atas pemaksaan demokratisasi pascakonflik.² Pemerintahan Taliban pasca mundurnya Uni Sofyet di Afghanistan menjadi tamparan keras bahwa Afghanistan belum siap melaksanakan perdamaian yang lebih permanen. Setelah koalisi Barat menjatuhkan pemerintahan Taliban, Afghanistan masih dirundung ancaman keamanan konflik horizontal yang melibatkan faksi-faksi kesukuan yang kuat, di samping ancaman dari Al Qaidah dan ISIS. Terjadi demokrasi setengah hati, dan proses pembangunan yang lambat akibat rendahnya investasi. Investor enggan melakukan investasi di daerah yang belum stabil dan terancam keamanannya. Afghanistan, Timor-Leste, Filipina Selatan dan Aceh memiliki pengalaman yang sama.

Dalam studi Hubungan Internasional resolusi konflik terkait dengan diplomasi dan kerjasama keamanan internasional. Ada beberapa aktor yang terlibat dalam negosiasi dan resolusi konflik. Weatherbee melihat tiga level aktor internasional di Asia Tenggara: aktor-aktor negara regional (*Regional State Actors*), aktor-aktor negara ekstra-regional (*Extra-Regional Actors*), aktor-aktor bukan negara (*Nonstate Actors*).³ Tokoh-tokoh Muslim yang menjadi perhatian penelitian ini terlibat dalam ketiga level aktor internasional. Untuk resolusi konflik tingkat nasional, yang

¹ Martin Shaw, *Global Society and International Relations Sociological Concepts and Political Perspectives* (Cambridge: Polity Press, 1994).

² Mark Duffield, *Development, Security and Unending War Governing the World of Peoples* (Cambridge: Polity Press, 2007).

³ Donald E. Weatherbee, *International Relations in Southeast Asia the Struggle for Autonomy* (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2005).

juga melibatkan kerjasama internasional, banyak dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara, yang sering disebut dengan NGO (*Non Government Organization*) dan INGO (*International Non Government Organization*), atau di Indonesia lebih dikenal dengan nama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Kang, Mc Donald and Bae 2009). Smoker, Davis dan Munske (1990) menganalisis pendekatan konflik internasional dari beberapa aktor, yaitu negara-negara (*states*), perusahaan-perusahaan multinasional (*multinational companies*), organisasi-organisasi pemerintah internasional (*international governmental organizations*), lembaga swadaya (LSM) nasional dan internasional (*national and international non-governmental organizations*).

Artikel ini menganalisis peran Indonesia dalam perdamaian di Asia Tenggara. Artikel akan diawali dengan perdebatan tentang konsep resolusi konflik dan peran negara dan masyarakat sipil dalam resolusi konflik regional. Dilanjutkan dengan beberapa pengalaman Indonesia dalam melakukan mediasi dan resolusi konflik baik di Filipina Selatan, Kamboja, maupun Thailand Selatan. Pengalaman ini diperkuat dengan suksesnya Indonesia dalam melewati transisi demokrasi dari Orde Baru. Artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian sejak 2008, dengan wawancara beberapa tokoh perdamaian Indonesia yang hingga kini menjadi salah satu tokoh perdamaian dunia dan memberi inspirasi pada banyak konferensi yang diadakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), negara-negara dan masyarakat sipil.

Resolusi Konflik

Adalah Emmanuel Kant yang memberi landasan kuat atas hak-hak dan kebebasan individu yang kemudian sangat berpengaruh dalam membentuk demokrasi liberal Barat. Kant menganggap bahwa ‘zona perdamaian’ hanya bisa dilakukan di antara negara-negara (demokrasi) liberal. Kant lahir di Königsberg (sekarang Kaliningrad), Prusia Timur pada 22 April 1724. Gagasan Kant banyak distimulasi/menstimulasi Revolusi Prancis 1776 dan 1789. Kant sangat kritis dengan politik praktis

yang tidak memperhatikan ekspresi masyarakat umum, yang menghendaki perdamaian yang utuh.⁴

Kant menerbitkan esai dengan judul *Toward Perpetual Peace: a Philosophical Sketch* pada tahun 1795, hampir bersamaan dengan perjanjian damai *The Treaty of Basel* antara Prusia dan Prancis pada Maret 1795. Bagi Kant, perjanjian damai ini hanya penghentian sementara, bukan perdamaian. Pandangan Kant tentang perdamaian yang langgeng menjadi teori klasik perdamaian. Dalam tradisi Hubungan Internasional, Kant dimasukkan dalam kelompok liberal klasik. Menurut Kant, untuk menciptakan perdamaian maka hak-hak warga negara (*citizen*) harus diutamakan. Ada tiga aspek gagasan Kant terkait perdamaian:

1. *The external sovereignty of states and the changed nature of relations among them.*
- (2) *The internal sovereignty of states and the normative limitations of classical power politics.*
- (3) *The stratification of world society and a globalization of dangers which make it necessary for us to rethink what we mean by "peace".*

[(1) Kemerdekaan eksternal dan hubungan yang berubah antar negara. (2) Kemerdekaan internal negara-negara dan keterbatasan normatif politik kekuasaan klasik. (3) Stratifikasi masyarakat dunia dan globalisasi adalah bahaya yang mengarahkan kita untuk memikirkan ulang atas apa yang kita sebut "perdamaian"].⁵

Untuk memahami peran Muslim Indonesia dalam negosiasi dan resolusi konflik dibutuhkan pemahaman atas prinsip-prinsip dasar resolusi konflik, yang sesungguhnya telah dipraktikkan oleh tokoh Muslim dalam berbagai konflik sosial di Indonesia pasca Orde Baru. Kesepakatan damai bagi Muslim-Kristen Poso dalam Malino I (2001) dan Muslim-Kristen Maluku dalam perjanjian damai Malino II (2002) melibatkan banyak tokoh Muslim baik dari ormas Islam, seperti Muhammadiyah, NU dan lembaga pesantren maupun pemerintah yang direpresentasikan oleh Departemen

⁴ H.S. Reiss (editor), *Cambridge Texts in the History of Political Thought Kant Political Writings* (Cambridge: Cambridge University Press, 1991).

⁵ Jürgen Habermas, "Kant's Idea of Perpetual Peace, with the Benefit of Two Hundred Years' Hindsight", dalam *Perpetual Peace Essays on Kant's Cosmopolitan Ideal*, James Bohman (eds.) (Cambridge: The MIT Press, 1997), h. 127.

Agama, Departemen Sosial dan Majelis Ulama Indonesia. Mereka secara intens melakukan negosiasi dan komunikasi untuk upaya perdamaian di Poso dan Maluku dengan tokoh-tokoh Kristen. Demikian juga dengan kerusuhan di Solo (1998), di Situbondo dan Tasikmalaya (1996) yang melibatkan negosiasi dan komunikasi dengan etnis dan agama yang berbeda, yaitu masyarakat Tionghoa dan Kristen karena target kerusuhan adalah pertokoan milik pengusaha Tionghoa, juga Gereja dan sekolah Kristen.

Dalam negosiasi dan resolusi konflik prinsip persuasi menjadi hal penting yang dilakukan oleh para tokoh Muslim. Mereka menjadi mediator ulung secara arif dengan pendekatan persuasi, yang lebih mementingkan jalan damai dibandingkan metode ancaman atau demonstrasi untuk memaksa pihak lain mengikuti aspirasi suatu kelompok. Menurut Ledgerwood et.al dalam *The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice* bahwa persuasi adalah upaya pendekatan yang bisa mengubah perilaku dan aksi dengan dasar saling percaya dari kekerasan menuju perdamaian.⁶ Sementara negosiasi adalah proses yang dilakukan oleh satu atau lebih entitas secara bersama mendiskusikan masalah yang menjadi sumber konflik demi manfaat yang baik bagi kedua belah pihak.⁷ Dalam praktiknya, negosiasi lintas budaya seringkali melibatkan pendekatan agama, bahasa dan adat untuk mendapatkan solusi terbaik, demi kepentingan bersama menuju perdamaian.

Dalam banyak upaya perdamaian, tokoh Muslim Indonesia melakukan negosiasi dengan tokoh berbeda agama dan etnis dengan pendekatan lintas budaya untuk kepentingan bersama. Mereka masing-masing melakukan persuasi terhadap komunitas masing-masing baik sebelum negosiasi maupun setelah dilakukan kesepakatan damai. Mereka

⁶ Alison Ledgerwood (et.al.), "Changing Minds: Persuasion in Negotiation and Conflict Resolution", dalam *The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice*, editor Morton Deutsch, Peter T. Coleman dan Eric Colton Marcus (San Francisco: Jossey-Bass, 2006).

⁷ Robert T. Moran (et.al.), *Managing Cultural Differences: Global Leadership Strategies for the 21st Century* (Oxford: Butterworth Heinemann, 2007).

adalah mediator bagi komunitas yang terlibat konflik. Tokoh adat dan agama dalam upaya perdamaian Malino II dan beberapa kesepakatan adat *pela gandong* di Maluku melakukan persuasi dan negosiasi. Representasi Muslim menginginkan pembaruan kesepakatan damai secara adat (*panas pela*) tanpa melanggar rambu-rambu agama. Dalam sejarah perjanjian damai, masing-masing perwakilan komunitas meneteskan darah dalam semangkok air, dan diminum bersama sebagai simbol penghentian perang atau konflik. Dalam kesepakatan damai dalam konflik 1999-2002, cukup dengan menandatangani prinsip-prinsip dasar perdamaian yang menguntungkan kedua belah pihak.⁸

Sebagai bagian dari kelas menengah, tokoh Muslim memainkan posisi strategis dalam upaya perdamaian. Menurut Akbarzadeh dan Saeed (2003) bahwa tokoh Muslim sebagai bagian dari kelompok kelas Menengah Indonesia telah memainkan peran dalam banyak hal di antaranya dialog lintas agama (*interfaith dialogue*), resolusi konflik dan kesetaraan gender. Mereka aktif dalam penguatan masyarakat sipil sejak masa Orde Baru, dan mendapatkan tempat strategis dalam penyelesaian kerusuhan dan konflik sosial pasca Orde Baru.

Gagasan Bassam Tibi juga menarik untuk dipertimbangkan dalam memahami agama di tengah dinamika konflik dan transisi politik.⁹ Ekuivalen dengan interpretasi Tibi, agamawan Kamboja, sebagai suatu perbandingan dengan tokoh Muslim Indonesia, adalah salah satu di antara banyak contoh betapa elite agama memainkan posisi strategis

⁸ Secara umum Muslim lokal setuju atas segala upaya perdamaian. Tetapi Laskar Jihad memprovokasi masyarakat Muslim Maluku untuk tidak berhenti melakukan perlawanan dan menolak kesepakatan damai dengan masyarakat Kristen, yang sering mereka asosiasikan dengan RMS. Laskar Jihad menggunakan media radio, selebaran dan buletin yang secara masif mereka lakukan sejak 2001 hingga akhir 2002. Karena itu, dalam perjanjian Malino II, mereka tidak diikutkan mewakili komunitas Muslim yang dikhawatirkan akan mengancam proses mediasi dan negosiasi. Demikian juga, dalam upaya damai secara adat *Pela Gandong* dikategorikan oleh Laskar Jihad sebagai tradisi *jahiliyah*, yang bertentangan dengan syariat Islam.

⁹ Bassam Tibi, *Islam and the Cultural Accommodation of Social Change* (USA: Westview Press, 1990).

dalam gerakan antikekerasan dan pengembangan perdamaian. R. Scott Appleby dalam karyanya yang fenomenal *The Ambivalence of the Sacred Religion, Violence and Reconciliation*, sangat tajam menjelaskan pentingnya posisi agama.¹⁰ Appleby juga tetap menyadari adanya sisi radikalisme dan fundamentalisme yang muncul dalam masyarakat agama, tetapi bukan dari akar agama. Pemicunya adalah ekonomi dan politik.

Adalah Samdech Preah Maha Ghosananda, usia 68 tahun, seorang pendeta Budha Kamboja, pada tahun 1993 memimpin ratusan pendeta, puluhan aktivis organisasi nonpemerintah (ornop) dan diikuti puluhan ribu penduduk untuk mendukung pesta demokrasi pertama di Kamboja pascaruntuhnya Khmer Rough. Setahun kemudian Ghosanda juga memimpin rekonsiliasi nasional diikuti oleh ratusan agamawan Budha lainnya. Figur Ghosananda posisinya sama dengan Mother Theresa (Kristen), Mahatma Gandhi (Hindu) dan Muhammad (Islam) dalam melakukan pembebasan sosial dari segala jenis otoritarian. Dalam aspek regional Indonesia, gerakan ornop, di antaranya LP3ES, di pesantren-pesantren pada tahun 1970-1980-an adalah upaya pembebasan dari bawah. Pencerahan pesantren dari ketertinggalan metodologi dan manajemen. Produk gerakan ini memunculkan generasi lapis tengah pesantren di antaranya Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Emha Ainun Najib, dan Muslim Abdurrahman yang memperkuat posisi pesantren sebagai *civil society* melawan kuatnya hegemoni negara. Tokoh-tokoh lain yang penting untuk dicermati dalam resolusi konflik dan gerakan perdamaian adalah M. Din Syamsuddin dan Ahmad Syafi'i Ma'arif (aktif dalam dialog antaragama), Husein Muhammad (kesetaraan gender), Tuan Guru Turmudzi Badruddin (pencegahan konflik di Lombok), Ulama Dayah di Aceh, di antaranya Tgk. H. Ibrahim Bardan (Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh) dalam mediasi antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM sebelum kesepakatan damai Helsinki 15 Agustus 2005, dan tokoh-

¹⁰ R. Scott Appleby, *The Ambivalence of the Sacred Religion, Violence, and Reconciliation*, (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2000).

tokoh agama dan adat di berbagai konflik, kekerasan dan kerusuhan di Indonesia.

Bagaimana pula dengan peran tokoh Muslim dalam *peace-building* dan gerakan antikekerasan (*non-violence*)? Beragamnya cakupan *peacemakers* dan kemungkinan peran tokoh Muslim di dalamnya akan memudahkan kita untuk melihat lebih dekat bagaimana elite komunitas Muslim dalam menyelesaikan persoalan sosial, ekonomi sekitar mereka, atau lebih luas lagi. Apakah tokoh Muslim dan atau sebagian komunitasnya pernah memainkan peran dalam kasus di antaranya: diskriminasi ekonomi, pembelaan buruh, tekanan atas hak-hak rakyat, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), penghijauan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan mengutamakan upaya rekonsiliasi terhadap setiap persoalan daripada menghadapinya dengan kekerasan. Kuatnya peran tokoh Muslim di Jawa Tengah dalam menyelesaikan kasus Bendungan Kedung Ombo yang memakan korban 32 nyawa rakyat, di Jawa Timur dalam kasus kerusuhan Situbondo, di Sulawesi Selatan dalam membantu pengungsi Muslim Makassar (BBM) dari Maluku, di Lombok dalam meredam kerusuhan Mataram, atau peran-peran lain dalam menciptakan hubungan multietnis dan agama lebih baik. Di samping peran kuat mereka pada level regional melalui pendekatan kenegaraan dan pendekatan budaya dan agama. Tokoh-tokoh Muslim Indonesia seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam membagi pengalaman mereka melakukan perjanjian damai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kesepakatan damai GAM dan Republik Indonesia menurut Martti Ahtisaari dalam pidatonya di penganugerahan Nobel Perdamaian (*Nobel Peace Prize*) merupakan salah satu kesepakatan paling sukses dalam setengah abad konflik di banyak negara. Kini GAM bertransformasi menjadi partai-partai politik dan para elit GAM aktif dalam memimpin partai politik, menjadi gubernur, bupati, walikota, anggota DPR, aktivis perdamaian, memimpin LSM,

menjadi pengajar dan sukses dalam bisnis dan pembangunan di Aceh.¹¹

Masa Depan Perdamaian

Banyak tokoh Muslim Indonesia diakui secara internasional dalam mediasi dan pencegahan konflik, kekerasan dan ketegangan yang melibatkan kelompok dan masyarakat lintas negara. Di samping konflik lokal di Indonesia baik antaragama, etnis atau konflik melibatkan masyarakat dan negara. Di dunia internasional, konflik yang panjang antara Khmer Merah dan pemerintah Kamboja, Muslim di Mindanao dan Pemerintah Filipina, Muslim di Selatan Thailand dan Pemerintah Thailand, serta konflik dan upaya perdamaian di Timur Tengah dan Afrika. Beberapa nama yang akan dibahas dalam upaya perdamaian di antaranya Menlu Ali Alatas, Wapres Yusuf Kalla, Presiden KH. Abdurrahman Wahid, KH. Hasyim Muzadi, Prof. A. Syafi'i Ma'arif dan Prof. Din Syamsuddin. Banyak di antara aktivis perdamaian juga non Muslim Indonesia, tetapi tulisan ini akan fokus pada tokoh Muslim dan nilai-nilai keislaman yang mempengaruhi mereka dalam negosiasi dan resolusi konflik.

Ali Alatas, menteri luar negeri Indonesia selama empat periode kabinet antara 1987-1999, pada masa Soeharto dan B.J. Habibie. Ali Alatas lahir di Jakarta, 4 November 1932, alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1956 dan Akademi Dinas Luar Negeri 1956. Ali Alatas pernah dinominasikan oleh sejumlah negara Asia pada 1996 sebagai Sekjen PBB. Setidaknya dua kesepakatan damai di Kamboja (antara 1988 sampai dengan 1991) dan Filipina (antara 1993 sampai dengan 1996) dimediasi oleh Ali Alatas. Inisiatif pertama upaya mediasi yang dihadiri perwakilan kelompok yang bertikai di Kamboja, yaitu HRH Samdech Norodom Sihanouk—mewakili pemerintah Kamboja—dan H.E.

¹¹ Badrus Sholeh, *Democracy, Regional Autonomy and Peace in Aceh*, disertasi PhD, (Melbourne: Deakin University, 2015); Badrus Sholeh, "The Prospect of Democracy and Peace in Aceh," *East Asia Forum*, 29 Oktober 2011, diakses pada 20 Oktober 2016 dari <http://www.eastasiaforum.org/2011/10/29/the-prospect-of-democracy-and-peace-in-aceh/>.

Mr. Hun Sen—mewakili Kelompok Khmer Merah—yang dilakukan di Bogor pada 25-28 Juli 1988, dengan istilah *Jakarta Informal Meeting*. Dalam pertemuan ini Ali Alatas (2001: 295) menyatakan bahwa “*any settlement, to be just and durable should be attained through political means and not by force of arms*”. Setelah melalui beberapa pertemuan, perjanjian perdamaian dilakukan di Paris dalam *The Paris International Conference on Cambodia*, 23 Oktober 1991. Upaya perdamaian ini melibatkan juga PBB dan ASEAN sebagai organisasi internasional yang ikut memfasilitasi proses rekonsiliasi.

Selanjutnya, dalam menjembatani konflik antara MNLF (Morro National Liberation Front) dan Pemerintah Filipina, Ali Alatas memainkan peran penting dalam kesepakatan damai antara milisi Muslim dan pemerintah Filipina. Hingga saat ini MNLF tetap menaati kesepakatan yang telah dilakukan dengan pemerintah. Atas permintaan kedua belah pihak yang bertikai, Ali Alatas memimpin proses rekonsiliasi yang dihadiri oleh Pemerintah Republik Filipina (GRP, Government of the Republic of the Philippines) dan Front Pembebasan Nasional Morro (MNLF, the Morro National Liberation Front) di Istana Bogor, 14 April 1993. Dalam proses rekonsiliasi, Ali Alatas menyatakan bahwa “Negosiasi yang baik membutuhkan semangat konsiliasi, konsesi yang saling menguntungkan dan keinginan untuk mencapai perdamaian dan solusi yang adil”.¹² Upaya perdamaian ini melanjutkan semangat Persetujuan Damai Tripoli 1976, dengan menciptakan otonomi luas di bawah integritas teritorial dan kedaulatan Filipina. Setelah lebih dari 70 kali pertemuan informal, disepakati sembilan area Otonomi: Perdamaian Nasional, Tentara Keamanan Regional, Pendidikan, Sistem Ekonomi dan Keuangan, Hasil pertambangan dan mineral, Sistem Administrasi, Representasi dalam Pemerintah Nasional, Lembaga legislatif dan eksekutif, dan peradilan dan pengenalan syariah Islam. Pada 1996, melalui peran utama Menlu Ali Alatas dan dukungan OIC disepakati perjanjian damai antara Pemerintah

¹² Ali Alatas, *A Voice for a Just Peace: A Collection of Speeches* (Singapura-Jakarta: IESEAS dan Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 304.

Filipina dan Morro National Liberation Front (MNLF) bahwa:

*“Whereas, the MNLF, led by Professor Nur Misuari, inspired by their quest for peace and prosperity, had in the past asserted the right of the Moro people in freely determine their political status and freely pursue their religious, social, economic and cultural development.”*¹³

Nahdlatul Ulama menjadi salah satu Organisasi Masyarakat Sipil yang memiliki peran utama dalam mendampingi MNLF dan Muslim di Filipina Selatan untuk memikirkan pembangunan ekonomi dan sosial politik, sesuatu yang lebih bermakna bagi masyarakat Mindanao yang masih dihantui kemiskinan dan pendidikan yang rendah akibat konflik yang berkepanjangan.

Sayangnya, di Filipina Selatan banyak kelompok milisi terorganisasi yang tidak masuk dalam kesepakatan damai 1996. Di antaranya adalah MILF (Morro Islamic Liberation Front) dan kelompok Abu Sayyaf (ASG, the Abu Sayyaf Group). Bahkan MILF dan ASG memperkuat barisannya dengan melibatkan banyak kelompok milisi dari berbagai organisasi dan wilayah di Asia Tenggara. Fatchurrohman Al Ghozi, Dulmatin dan Umar Patek—ketiganya terlibat dalam Bom Bali 2002 adalah di antara Mujahidin dari Indonesia yang berjuang bersama MILF dan ASG. Fatchurrahman Al Ghozi meninggal di Filipina, menjadi korban dalam perburuan oleh tentara Filipina setelah lepas dari penjara. Dulmatin meninggal dalam operasi Densus 88 di Pamulang, Banten pada Maret 2010.¹⁴ Sementara Umar Patek menjadi target perburuan Densus 88 dan keamanan beberapa negara di Asia Tenggara. Kemudian ditangkap di Pakistan setelah lebih dari sepuluh tahun melarikan diri dari Indonesia, bergabung lama dengan MNFL, MILF dan Kelompok Abu Sayaf. Kini Umar Patek dipenjara di Porong, Jawa Timur dan aktif dalam program deradikalisasi di Jawa Timur. Dalam dua kali diminta sebagai pembicara seminar nasionalisme

¹³ “1996 Peace Agreement with the Moro National Liberation Front,” diakses pada 9 November 2016 dari <http://pcdspo.gon.ph/downloads/2012/10/Final-Peace-Agreement-MNLF-September-2-1996.pdf>.

¹⁴ ICG, *Indonesia: Jihadi Surprise in Aceh*, Asia Report No. 189-20 April 2010.

oleh Resimen Mahasiswa Jawa Timur di Malang dan Lamongan, Patek mendapat kesan “menyayangkan mereka tidak mengundang santri, mahasiswa dan siswa dari *madrasah* kelompok yang paling rentan dalam rekrutmen kelompok teroris, terutama ISIS.”¹⁵

Menyingkirnya Umar Patek dan Mujahidin Indonesia serta negara asing lainnya merupakan bagian dari kesepakatan damai antara MILF dan Pemerintah Filipina yang juga melibatkan Pemerintah dan Masyarakat Sipil Republik Indonesia. Kementerian Luar Negeri RI dan Muhammadiyah – yang secara resmi menjadi salah satu International Contact Group (ICG) ikut mengawasi proses perjanjian damai. Professor Din Syamsuddin sebagai ketua PP Muhammadiyah memiliki peran aktif dalam negosiasi perdamaian dan upaya implementasinya. Pada tahun 2012 ditandatangani Bangsamoro Basic Law (BBL), perjanjian damai antara Pemerintah Filipina dan Morro Islamic Liberation Front (MILF). Tetapi perjanjian ini mengalami masalah karena tidak melibatkan kelompok MNLF. Nur Misuari dan MNLF ingin dimasukkan sebagai salah satu kelompok dalam implementasi perjanjian ini. Ini merupakan spirit perjanjian damai 1996. Misuari juga tetap berharap pada Ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama untuk terlibat dalam mengawal proses perjanjian ini.

Nur Misuari menyatakan pemerintah Filipina seperti kurang serius menghadapi tuntutan Bangsamoro itu. Oleh sebab itu, ia mendesak NU sebagai organisasi Islam terbesar mendukung tuntutan itu lewat pemerintah Indonesia.¹⁶ Prof Misuari menyampaikan itu kepada Wakil Ketua Umum PBNU As’ad Said Ali di kantor Wahid Institute pada 21 Juli 2011. Misuari didampingi tujuh delegasi dari Mindanao. Kehadiran Misuari ke Jakarta sebagai salah satu *concern* penting bagaimana Ormas Islam di Indonesia harus serius mengawal proses perdamaian.

¹⁵ Umar Patek, wawancara personal di rutan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur pada 1 Oktober 2016.

¹⁶ “PBNU Dukung Perundingan Bangsamoro-Pemerintah Filipina,” The Wahid Institute, 22 Juli 2011, diakses pada 9 November 2016 dari http://www.wahidinstitute.org/v1/News/Detail/?id=354/bl=id/PBNU_Dukung_Perundingan_Bangsamoro_-Pemerintah_Filipina.

Demikian juga dengan Muhammad Yusuf Kalla, menjadi salah satu ikon penting dalam proses perdamaian baik dalam negeri maupun luar negeri. Kesepakatan damai antara Muslim dan Kristen Poso dalam Malino I (2001) dan Muslim-Kristen Maluku dalam Malino II (2002) tidak lepas dari peran utama Yusuf Kalla dalam mediasi dan rekonsiliasi komunitas Muslim dan Kristen. Perjanjian damai sangat berpengaruh dalam menurunnya eskalasi bentrokan antardua komunitas berbeda agama. Bahkan ketika masih menjabat Wakil Presiden, Yusuf Kalla melakukan pencegahan aksi kekerasan menyusul kontak senjata antara Brimob Polri dan kelompok Tanah Runtuh Poso¹⁷ pada Oktober 2006. Yusuf Kalla meyakinkan masyarakat Muslim bahwa:

Penegakan hukum yang dimaksud dalam Deklarasi Malino adalah terhadap kasus-kasus yang sudah terlanjur diproses hukum dan kasus-kasus setelah Deklarasi Malino... [karena itu] penyelidikan kasus-kasus terorisme yang terjadi dan telah diidentifikasi oleh Polri harus didukung dan dilaksanakan secara konsisten.¹⁸

Dengan pengalaman mediasi dalam negeri, Yusuf Kalla yang menjabat Wakil Presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai hasil Pemilu 2004 mencoba mendekati tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk menghentikan upaya separatisme dengan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, Negara Kesatuan Republik

¹⁷ Kelompok Tanah Runtuh adalah sekelompok aktivis Muslim berasal dari Jawa, Sulawesi dan lokal Poso yang sebagian dianggap terkait dengan jaringan terorisme di Indonesia. Mereka tinggal di daerah Poso Kota, yang dikenal dengan wilayah Tanah Runtuh. Beberapa diantara mereka adalah anggota Jamaah Islamiah, yang aktif dalam aksi jihad ketika masa konflik Poso. Diantara aksi yang dilakukan adalah pembunuhan terhadap siswi Kristen, pendeta dan pemboman Tentena. Akibat tekanan pada 2006, banyak diantara mereka keluar dari Poso dan bergabung dengan Mujahidin di Jawa. Mereka umumnya dikenal dengan veteran Poso, melengkapi veteran Maluku dan veteran Afghanistan. Sebagian veteran ini tidak terlibat dalam aksi terorisme, mereka lebih fokus pada dakwah dan pemberdayaan ekonomi Muslim. Bagi mereka wilayah diluar Konflik Poso, Maluku dan Afghanistan, disamping Iraq dan Palestina adalah wilayah aman yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan medan *jihad* (baca: perang).

¹⁸ M. Tito Karnavian, *Indonesian Top Secret: Membongkar Konflik Poso* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 212.

Indonesia. Akhirnya dengan beberapa pertemuan negosiasi yang didukung dan difasilitasi oleh Uni Eropa, GAM dan Republik Indonesia melakukan kesepakatan damai pada 2005. Kesepakatan ini memberi kesempatan para pimpinan dan anggota GAM untuk aktif dalam politik dan kegiatan lain demi terwujudnya perdamaian dan kemakmuran masyarakat Aceh.

Pada Pemilihan Gubernur 2006, representasi GAM (Irwandi Yusuf—mantan Juru bicara GAM) berhasil mengungguli tokoh-tokoh lain dan berhasil menjadi gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. Bahkan dalam Pemilu 2009, GAM membuat partai lokal—yang berbeda dengan umumnya partai di Indonesia berpusat di Jakarta. Semula partai yang mewakili masyarakat GAM adalah Partai GAM, tetapi untuk menghindari kesan munculnya gerakan kembali GAM maka diubah menjadi Partai Aceh, yang juga mengungguli partai-partai lokal dan nasional lain. Dengan demikian GAM menguasai wilayah eksekutif dan legislatif.

Hingga saat ini Yusuf Kalla tetap dipercaya oleh masyarakat Indonesia untuk mendamaikan ketegangan dan mencegah potensi konflik. Irwandi menyatakan bahwa “Jusuf Kalla telah berhasil meyakinkan GAM dan masyarakat Aceh untuk berhenti berperang dan berubah menjadi masyarakat demokratis, damai dan aktif dalam mengisi pembangunan. Proses ini dilalui melalui beberapa tahap meski masih ada beberapa individu dan kelompok kecil kombatan yang melakukan kekerasan yang ingin mendapatkan perhatian lebih akibat tersisih dari proses transisi ini.”¹⁹ Seiring dengan pandangan Irwandi, Hamid Awaludin yang memimpin delegasi dari Republik Indonesia dalam perjanjian Helsinki memberi kesan mendalam tentang peran Jusuf Kalla dalam negosiasi dan pelaksanaan perdamaian di Aceh yang kini telah melewati satu dekade. Awaludin menyatakan bahwa prinsip keteguhan itu, banyak memegang andil dalam mencapai damai Aceh. Bagi JK, sekali berjanji, dia tidak akan lari, sebab baginya, janji adalah komitmen, dan komitmen wajib hukumnya dijalankan. Prinsip inilah yang dihormati oleh para pemimpin

¹⁹ Irwandi Yusuf, wawancara dengan penulis di Banda Aceh, 9 Februari 2012.

GAM sehingga mereka bisa percaya tentang apa yang dijanjikan oleh JK. Karena ada kepercayaan maka perundingan bisa berlangsung mulus.²⁰

Pengalaman Aceh dalam transisi demokrasi dan perdamaian menjadi pelajaran penting bagi dunia internasional khususnya negara-negara yang masih mengalami konflik separatis seperti di Filipina Selatan dimana Pemerintah Filipina dan tokoh-tokoh MILF berkunjung ke Aceh untuk belajar langsung dalam menjaga perdamaian melalui partisipasi demokrasi.²¹ Teungku Jamaica, mantan juru bicara GAM, menyatakan Indonesia terus diamati dunia internasional dalam menjaga transisi demokrasi dan perdamaian di Aceh. Menurut Jamaica pemerintah dan masyarakat sipil dari Filipina Selatan, Sri Lanka, Thailand Selatan, dan negara-negara Timur Tengah dan Barat datang ke Aceh belajar perdamaian melalui pemerintah dan masyarakat sipil baik GAM maupun masyarakat Aceh lain. Aceh menjadi pelajaran penting bagi perdamaian internasional. Jamaica menyayangkan pemerintah pusat masih menghalangi investor asing untuk melakukan investasi di Aceh. Kantor Imigrasi di Jakarta tidak mengizinkan masyarakat asing dan perusahaan internasional dengan menjelaskan bahwa Aceh masih belum aman. Ini kontra produktif dalam pelaksanaan damai dan pembangunan di Aceh.²²

Pendekatan Ali Alatas dan Yusuf Kalla tentu saja tidak lepas dari karakter Muslim Indonesia yang moderat dan membuktikan Islam sebagai berkah bagi alam semesta. Yusuf Kalla seringkali merepresentasikan sebagai tokoh Nahdlatul Ulama dari Sulawesi Selatan. Dalam Mukhtamar NU di Makassar pada 2010, Yusuf Kalla hadir dan mendapat sambutan luar biasa dari peserta *mukhtamar* dan masyarakat NU. Kharisma dan

²⁰ Hamid Awaludin, *Damai di Aceh Catatan Perdamaian RI-GAM di Helsinki* (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2015), h. 276.

²¹ Badrus Sholeh, "A Coalition from Aceh to Mindanao," *The Jakarta Post*, 29 Desember 2014, diakses pada 20 Oktober 2016 dari <http://www.eastasiaforum.org/2011/10/29/the-prospect-of-democracy-and-peace-in-aceh/>.

²² Teungku Jamaica, wawancara dengan penulis di Jakarta, 31 Januari 2016. Teungku Jamaica kini mendampingi Wakil Gubernur Muzakir Manaf, mantan komandan militer GAM, menjelang Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur di Aceh tahun 2017.

ketokohan Yusuf Kalla menjadi bagian penting dalam aktivitas dan langkah dalam menjaga perdamaian dan melakukan mediasi bagi kelompok-kelompok yang bertikai baik berbeda agama, etnis maupun politik.

Indonesia juga memiliki tokoh-tokoh Muslim yang aktif dalam perdamaian baik di kalangan masyarakat Indonesia maupun lintas negara. Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafi'i Ma'arif adalah di antara mereka yang aktif dalam pertemuan lintas agama dan negara untuk mewujudkan perdamaian global. Keduanya masing-masing pernah menjadi pemimpin tertinggi ormas Islam NU dan Muhammadiyah, yang telah menjaga tradisi toleransi dan perdamaian sejak awal didirikan khususnya melalui lembaga pendidikan.²³ Karena itu, tradisi perdamaian dan pola mediasi lintas agama tidak terlepas dari pengalaman mereka dalam memimpin dua ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut. Gus Dur baik sebelum dan sesudah menjadi Presiden RI telah aktif dalam pertemuan pemimpin-pemimpin agama sedunia. Bagi Gus Dur dan Syafi'i Ma'arif, Islam sebagai agama paling lengkap dan pamungkas mestinya menunjukkan sikap lebih terbuka dan teladan bagi agama-agama lain di dunia. Ketika Gus Dur menjabat presiden beberapa upaya perdamaian dilakukan, di antaranya upaya mencegah kehadiran Laskar Jihad di Maluku yang kemudian memperparah kondisi konflik, baik di Maluku maupun di Poso. Demikian juga upaya kesepakatan damai antara GAM dan RI, yang difasilitasi oleh Henry Dunant Center. Tetapi karena adanya beberapa tokoh militer dan sipil yang mencoba menciptakan gejolak dan ketidakstabilan dalam negeri maka upaya Gus Dur mengalami banyak kebuntuan. Laskar Jihad bahkan mendapat fasilitas suplai senjata dan amunisi yang diproduksi oleh Pindad, perusahaan negara yang memproduksi senjata. Juga tiadanya kekompakan para pimpinan tentara sehingga kesepakatan yang telah dilakukan gagal akibat berlanjutnya bentrokan antara GAM dan tentara Indonesia di

²³ Florian Pohl, "Interreligious Harnony and Peace Building in Indonesian Islamic Education", dalam Cristina Jaime Montiel dan Noor, *Peace Psychology in Asia*, (New York: Springer, 2009).

Aceh. Hingga saat ini Gus Dur menjadi ikon sebagai Bapak Pluralisme. Sementara Syafi'i Ma'arif melalui Ma'arif Institute masih aktif dalam dialog antaragama dan budaya.

Sebagai penduduk mayoritas, Muslim Indonesia juga aktif melakukan mediasi dan perdamaian antara Muslim di Thailand Selatan dan pemerintah Thailand, serta antara Muslim di Filipina Selatan dan pemerintah Filipina, di antaranya adalah Hasyim Muzadi dan beberapa tokoh NU. Melalui pendekatan Muslim tradisional dan tradisi Melayu, Hasyim Muzadi dan beberapa tokoh NU melakukan komunikasi aktif dengan tokoh-tokoh pesantren dan *madrasah* di kedua wilayah yang hingga saat ini masih bergolak. Pendekatan mereka lebih efektif daripada pemerintah resmi, yang dianggap melakukan tindakan diskriminatif baik secara politik, ekonomi dan agama terhadap minoritas Muslim.

Islam Indonesia dan Perdamaian Regional

Penduduk Muslim sebagai mayoritas di kawasan Asia Tenggara ikut mewarnai stabilitas kawasan ini. Muslim Asia Tenggara memiliki karakter berbeda dengan Muslim di kawasan Timur Tengah, Asia Tengah dan Eropa. Budaya Melayu sangat kental menyatu dalam tradisi keislaman di kawasan ini. Asia Tenggara tempat berkembangnya peradaban Islam yang berbeda dengan Islam di Timur Tengah. Islam mengalami adaptasi dan akulturasi dengan agama dan tradisi lokal. Muslim di Asia Tenggara memiliki karakter toleran, lembut dan budi luhur. Muslim di wilayah ini seringkali disebut '*Malay Muslim*'. Mungkin karena mayoritas Muslim yang menyebar di berbagai negara di Asia Tenggara berbahasa Melayu. Ini disebabkan oleh kelahiran atau jaringan pendidikan. Sejak puluhan tahun, ratusan ulama dari Malaysia, Brunei dan Thailand pernah belajar di pesantren atau *madrasah* di Indonesia. Ulama Indonesia juga menyebarkan Islam di negara Asia Tenggara. Jaringan ulama Melayu ini menurut Azyumardi Azra telah eksis selama beberapa abad, tidak hanya menjembatani ilmu Islam Arab dan Islam Nusantara, tetapi juga

menerjemahkan Islam dalam konteks masyarakat Melayu yang berbeda dengan masyarakat Arab. Muslim Melayu-Indonesia, menurut Imtiyaz Yusuf menjadi penyebar utama Muslim di Thailand Selatan.

Beberapa karakter penting Malay Muslim yaitu: *pertama*, ideologi pemikirannya Sunni (*Ahlussunnah wal Jamaah*) yang menekankan stabilitas dan keramahan dengan warna ideologi lain. Dalam aspek politik Malay Muslim juga menebarkan aspek kompromistis dan harmoni. Tiga negara Malay Muslim: Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam adalah *par excellence* dari politik masyarakat Muslim Melayu, yang mengutamakan kompromi, akomodatif dan mengedepankan komunalisme-kekompakan atau di Indonesia disebut gotong royong-kekeluargaan. Tradisi ini adalah produk dari adaptasi dan akulturasi agama Islam Arab dan agama-budaya lokal Asia Tenggara yang menghasilkan agama-tradisi baru: Muslim Melayu. Dua partai politik besar Muslim Melayu: UMNO dan Golkar mencerminkan sikap adaptasi ini. Akomodatif dalam beragama dan tetap menguasai politik 'persatuan'. Hal ini diperkuat dengan eksistensi pemimpin kedua partai dalam kekuasaan tertinggi pemerintahan masing-masing: Abdullah Badawi dan Yusuf Kalla.

Berbeda dengan Muslim di Thailand dan Filipina yang mengalami guncangan terus-menerus. Dalam kondisi minoritas, mereka 'dipaksa' untuk tunduk dalam tradisi mayoritas yang didominasi oleh tradisi dan politik non Muslim. Meskipun demikian kekuatan 'ulama Melayu' dikedua wilayah ini masih sangat diperhitungkan. Karena itu, tidak heran ketika Ulama NU diundang oleh Perdana Menteri Thaksin dan Raja Thailand untuk menjembatani perpecahan (*gap*) antara pemerintah Thailand dan Muslim Patani, Ulama NU melakukan pendekatan Islam Melayu. Mereka berhasil menjembatani dan membuat kemajuan untuk menyusun ulang Muslim Patani baru dalam payung Pemerintah dan Raja Thailand. Pascapemerintahan Thaksin, perdana menteri Thailand yang baru pun mengajak Indonesia untuk membantu penyelesaian krisis di Thailand Selatan dan tentu saja Menlu Hassan Wirayuda mendorong

KH Hasyim Muzadi untuk melanjutkan langkah-langkah yang pernah dirintis. Pendekatan Melayu dalam rekonsiliasi ini akan sangat strategis, tidak hanya menyatukan hubungan yang retak antara Muslim Patani dan Pemerintah Thailand.

Sedangkan Muslim Singapura tidak mengalami tekanan seperti di Thailand dan Filipina, meskipun sama-sama minoritas. Kemajuan ekonomi dan kokohnya pemerintahan Singapura memberi kesempatan yang luas bagi Muslim Singapura yang mayoritas Muslim Melayu untuk maju bersaing dengan etnis lain, khususnya Cina dan India. Tradisi melayu tetap hidup di Singapura, dan membentuk koloni–masyarakat Melayu Singapura–yang tumbuh nasionalisme di bawah Negara Singapura yang kaya. Banyak tokoh Muslim Singapura yang berhasil menjadi pengusaha, politisi dan intelektual ternama, mampu bersaing dengan etnis Cina yang dominan dan India. Muslim Melayu Singapura tidak hanya damai karena kemakmuran dan tingkat pendidikan yang merata, tetapi khususnya terjaganya tradisi Melayu dalam masyarakat. Muslim Melayu Singapura menjaga toleransi dan perdamaian dengan dominasi masyarakat Cina Singapura dan India.

Ini menjadi tantangan baru, bagaimana tradisi Malay Muslim dilakukan revitalisasi dalam pendidikan, politik dan budaya agar bisa memenuhi tuntutan masyarakat baru Asia Tenggara, yang sedang *survive* dalam tekanan ekonomi global. Trauma krisis ekonomi belum pulih dalam kehidupan masyarakat, dan ini akan mudah dimasuki oleh tradisi baru yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik. *Jihad* yang dulu di pesantren dan madrasah memiliki makna luhur, menciptakan kedamaian dan kemajuan dalam masyarakat, kini mendapat nuansa dan interpretasi baru dengan kekerasan dan perang. Tantangan juga semakin berat dengan *trend* politisasi regulasi syariat Islam, yang jauh dari nilai-nilai dan kebiasaan Muslim Melayu yang tidak suka atas formalisasi Islam. Muslim Melayu menyajikan Islam secara substantif dan kultral. Budaya hedonis politisi yang pragmatis ini akan menjadi bumerang bagi masa depan Muslim

di Asia Tenggara dalam jangka panjang. Muslim Indonesia yang dulu dilihat damai dalam beribadah dan ber-*muamalah* (termasuk ber-*siasah*), kini dilihat oleh Muslim Malaysia dan Singapura sebagai saudara tua yang berubah dan tampak menegangkan (kalau tidak menakutkan). Semakin pudarnya tradisi Muslim Melayu dalam paruh kedua dekade terakhir membutuhkan daya juang dan pikir serius bagaimana upaya revitalisasi dan refleksi atas pengembangan pendidikan dan dakwah yang lebih humanis dan toleran. Kunjungan ulama Muhammadiyah dan NU di Thailand Selatan dan beberapa upaya perdamaian di Filipina akan sangat positif tidak hanya bagi imej positif tentang Islam Indonesia, tetapi lebih jauh dan hakiki bagaimana Muslim Indonesia ikut terlibat aktif dalam perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Bahkan inisiatif ini telah melampaui benua lain yakni terciptanya rekonsiliasi di Irak, kedamaian di Palestina dan Iran. Kedamaian oleh Muslim Asia Tenggara ini harus direvitalisasi, dengan kerjasama yang kuat antara Ulama dan Umara. Ini akan menciptakan wilayah yang damai dan makmur di berbagai belahan dunia, khususnya Asia Tenggara.

Kesimpulan

Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dunia dan negara demokratis terbesar nomor tiga setelah India dan Amerika Serikat memiliki peran penting dalam negosiasi dan perdamaian pada tingkat regional dan internasional. Tidak hanya Indonesia karena telah melewati transisi politik dari otoriter Orde Baru menuju reformasi yang awalnya diprediksi terbelah menjadi negara federal, juga secara ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil antara 5 sampai 6 persen. Indonesia telah berhasil menjadi mediator yang sukses pada konflik di Kamboja dan Filipina Selatan, serta beberapa konflik di Timur Tengah dan Afrika.

Beberapa figur seperti Menteri Luar Negeri Ali Alatas, Presiden Abdurrahman Wahid, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono adalah di antara tokoh pemerintah Indonesia yang aktif menegedepankan diplomasi dan pendekatan damai pada pemerintah dan masyarakat yang sedang berkonflik. Pada level masyarakat sipil Ahmad Syafi'i Ma'arif, M. Din Syamsuddin dan KH Hasyim Muzadi aktif dalam upaya perdamaian di Filipina Selatan saat ini ketika MILF dan Pemerintah Filipina melakukan kesepakatan perdamaian, dan mendekatkan raja dan pimpinan pemerintah Filipina dengan kelompok pemberontak di Thailand Selatan melalui pendekatan kultural keagamaan. Minoritas Muslim di Asia Tenggara sangat mengharapkan peran aktif Indonesia dalam menengahi negosiasi perdamaian agar bisa tercipta perdamaian yang lebih permanen dan implementasi damai secara jangka panjang. Transformasi para kombatan di Filipina Selatan menuju masyarakat Muslim yang aktif dalam partisipasi politik dan pembangunan membutuhkan pendampingan secara langsung.

Indonesia berhasil melewati krisis konflik etnis dan agama di Maluku, Poso, Sambas, serta konflik separatis di Aceh. Indonesia juga sukses dalam memediasi konflik di Kamboja, Filipina Selatan, Thailand Selatan. Dengan modal ini disertai dengan kepercayaan diri pertumbuhan ekonomi yang stabil serta suasana demokratis, Indonesia bisa melangkah lebih percaya diri dalam memainkan peran perdamaian internasional yang lebih langgeng dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Akbarzadeh, Shahram dan Abdullah Saeed (ed.), *Islam and Political Legitimacy*, Oxon: LoutledgeCurzon, 2003.
- Alatas, Ali, *A Voice for a Just Peace: A Collection of Speeches*, Singapura-Jakarta: ISEAS dan Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Appleby, R. Scott, *The Ambivalence of the Sacred Religion, Violence, and Reconciliation*. Pengantar Theodore M. Hesburgh, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2000.
- Awaludin, Hamid, *Damai di Aceh Catatan Perdamaian RI-GAM di Helsinki*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2015.
- Duffield, Mark, *Development, Security and Unending War Governing the World of Peoples*, Cambridge: Polity Press, 2007.
- Goodhand, Jonathan, *Aiding Peace? The Role of NGOs in Armed Conflict*, Boulder, London: Lynne Rienner Publishers, 2006.
- Habermas, Jürgen, “Kant’s Idea of Perpetual Peace, with the Benefit of Two Hundred Years’ Hindsight”, dalam *Perpetual Peace Essays on Kant’s Cosmopolitan Ideal*, James Bohman dan Matthias Lutz-Bachmann (ed.) Cambridge: The MIT Press, 1997.
- ICG, *Indonesia: Jihadi Surprise in Aceh*, Asia Report No. 189- 20 April 2010.
- Kang. Sungho, John W. McDonald dan Chinsoo Bae (ed.), *Conflict Resolution and Peace Building: The Role of NGOs in Historical Reconciliation and Territorial Issues*, Seoul, Korea: Northeast Asian Historical Foundation, 2009.
- Karnavian, M. Tito, *Indonesian Top Secret: Membongkar Konflik Poso*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ledgerwood, Alison et. al . “Changing Minds: Persuasion in Negotiation and Conflict Resolution”, dalam Morton Deutsch (eds.), *The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice*, San Francisco: Jossey-Bass, 2006.
- Moran, Robert T. et.al. *Managing Cultural Differences: Global Leadership Strategies for the 21st Century*, Oxford: Butterworth Heinemann, 2007.
- Pohl, Florian, “Interreligious Harnony and Peace Building in Indonesian Islamic Education”, dalam Cristina Jaime Montiel dan Nooraini M.

- Noor, *Peace Psychology in Asia*, New York: Springer, 2009.
- Reiss, H.S. (ed.), *Cambridge Texts in the History of Political Thought Kant Political Writings*, Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- Salmi, Ralph H., Cesar Adib Majul dan George K. Tanham, *Islam and Conflict Resolution Theories and Practices*, Lanham: University Press of America, 1998.
- Shaw, Martin, *Global Society and International Relations Sociological Concepts and Political Perspectives*, Cambridge: Polity Press, 1994.
- Sholeh, Badrus, *Democracy, Regional Autonomy and Peace in Aceh*, Disertasi Ph.D, Melbourne: Deakin University, 2015.
- Sholeh, Badrus, "A Coalition from Aceh to Mindanao," *The Jakarta Post*, 29 Desember 2014, diakses pada 20 Oktober 2016 dari <http://www.eastasiaforum.org/2011/10/29/the-prospect-of-democracy-and-peace-in-aceh/>.
- Sholeh, Badrus, "The Prospect of Democracy and Peace in Aceh," *East Asia Forum*, 29 Oktober 2011, diakses pada 20 Oktober 2016 dari <http://www.eastasiaforum.org/2011/10/29/the-prospect-of-democracy-and-peace-in-aceh>.
- Smoker, Paul, Ruth Davies dan Barbara Munske (ed.), *A Reader in Peace Studies*, Oxford: Pergamon Press, 1990.
- Tibi, Bassam, *Islam and the Cultural Accommodation of Social Change*, USA: Westview Press, 1990.
- Weatherbee, Donald E., *International Relations in Southeast Asia the Struggle for Autonomy*, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2005.